

BAB VI

KESIMPULAN , SARAN DAN BATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan tentang inklusi keuangan di Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah. Nilai indeks inklusi keuangan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari provinsi dan pusat kegiatan ekonomi dan pembelajaran sehingga terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Untuk kategori sedang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori paling rendah. Rendahnya indeks inklusi keuangan wilayah tersebut menunjukkan akses terhadap jasa keuangan masih sulit.
2. PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita dari suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat inklusi keuangannya. Tingginya pendapatan per kapita suatu wilayah menjadi tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan kinerja perekonomian membaik
3. Angka melek huruf tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bisa dikarenakan masyarakat yang bisa membaca dan menulis (melek huruf) memiliki tingkat pendidikan

yang masih rendah. Dalam hal ini, kemampuan individu untuk mengakses perbankan tidak ditentukan oleh kemampuan membaca menulis, namun lebih kepada keinginan individu terkait untuk ikut andil dalam lembaga keuangan.

4. Jalan aspal berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan pengembangan dan pembangunan fisik jalan raya semakin memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik fungsi distribusi barang dan jasa. Maupun mobilitas penduduk serta daya tarik investasi. Jalan beraspal merupakan persyaratan dasar dalam mendirikan cabang bank dan jaringan ATM di daerah pedesaan dan penduduk yang kurang padat. Dengan demikian, semakin baik kondisi jalan suatu daerah akan memudahkan akses masyarakat pada lembaga keuangan.
5. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penurunan pengangguran maka meningkatkan jumlah pekerja. Meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja diikuti oleh menurunnya tingkat upah atau penghasilan. Penghasilan yang rendah dan tidak stabil akan membuat masyarakat memiliki rasa ketidakmampuan dalam mengakses layanan keuangan karena penghasilan yang rendah hanya diprioritaskan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saja. Kurangnya minat akan jasa lembaga keuangan menyebabkan kurang meratanya penyebaran lembaga formal keuangan yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan pun menjadi rendah atau menurun.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Baik pemerintah di setiap wilayah maupun pelaku sektor perbankan bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan dengan cara meningkatkan setiap dimensi keuangan inklusif. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Akses perbankan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan *branchless banking*. Sedangkan untuk dimensi kegunaan, baik pemerintah di setiap wilayah maupun *stakeholder* yang terkait dapat menyediakan kredit murah dan mudah diakses oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal.
2. Sebagaimana yang tercantum dalam Strategi Nasional Inklusif pada pilar pertama yaitu edukasi keuangan, maka diperlukan peningkatan pemahaman mengenai jasa perbankan dengan melakukan edukasi jasa keuangan terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, perempuan dan penduduk daerah yang tertinggal serta peningkatan infrastruktur fisik agar jasa keuangan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat diberbagai daerah. Seperti yang terjabar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai Keuangan Inklusif terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, data yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya mencakup data selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 atau enam tahun terakhir. Variabel yang peneliti gunakan hanyalah sedikit dari sekian banyaknya variabel yang mempengaruhi inklusi keuangan yang sebenarnya. Penelitian ini belum bisa mengungkapkan secara mikro, bahwa orang yang kaya memiliki jumlah rekening lebih dari satu, sedangkan adapula penduduk miskin yang tidak memiliki rekening di perbankan.